

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama pendapatan daerah yang mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah adalah pajak. Dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pembangunan di daerah melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama.

Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi diharapkan juga sanggup mengelola keuangan daerah, sehingga ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar.¹

Untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai pembiayaan penyelenggaraan

¹Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita, 2008, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

pemerintahan di daerah, perlu dilakukan strategi dalam mencapai tujuan tersebut, melalui peningkatan penerimaan di sektor pajak, khususnya Pajak Frogresif. Karena

meningkatnya pajak tersebut, akan berdampak pula pada pembiayaan terhadap pembangunan daerah.²

Pemerintah dalam hal ini, melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban membayar Pajak Progresif berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menghindari adanya ketidaksielarasan antara instansi yang terkait, atau yang berkepentingan serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan, masing-masing unsur yang terkait tersebut mempunyai tanggung jawab untuk memantapkan peran dan tugasnya dalam mengoptimalkan prosedur-prosedur pelayanan terhadap pembayaran atau penagihan Pajak Progresif dengan kesadaran yang tinggi.³

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

³Irawati, Mauren, 2009, *Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Unlam : tugas Akhir, Banjarmasin.

dari pemiliknya.” (HR. Imam Ahmad V/72 no.20714, dan di-shahih-kan oleh Al-Albani dalam Shahih wa Dha’if Jami’ush Shagir no.7662, dan dalam Irwa’al Ghalil no.1761 dan 1459.

Pajak Progresif merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga usaha pemungutannya perlu lebih diintensifkan agar penerimaan dari sektor pajak dimaksud akan terus meningkat dengan tetap memegang teguh prinsip keadilan dan kepastian hak. Berikut disajikan Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tabel 1.1⁴

TABEL 1.1 LAPORAN BULANAN PEMUNGUTAN TARIF PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR BULAN APRIL 2015 UPPD BANJARMASIN

NO	URAIAN	JUMLAH UNIT	JUMLAH PENERIMAAN (RP)
1	Penerimaan tarif Progresif	293	69,083,530
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	493	420,552,900
3	Mutasi Kendaraan Bermotor	-	0
4	Perubahan status Plat Pribadi (Hitam) ke Umum (Kuning)	151	148,975,700
	JUMLAH		638,612,130

Sumber; Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Bedasarkan hadist yang diriwayatkan Imam Ahmad tersebut diatas maka pajak progresif yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai aturan, dan harus dibayar dengan kerelan, karena hal ini merupakan salah satu kewajiban.

Data tersebut menunjukkan secara absolut kenaikan Pajak Progresif yang berfluktuasi maka penulis tertarik untuk Menganalisis Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.⁵

Sebagai konsekuensinya dengan semakin berkembangnya kegiatan bisnis maka kehadiran Pajak dan Retribusi sangatlah erat hubungannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena pajak dan retribusi merupakan sumber PAD. Meningkatnya tarif hidup dan ekonomi masyarakat merupakan dampak nyata keberhasilan pembangunan yang selama ini dilaksanakan, sehingga sepatutnyalah kepada masyarakat dituntut berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu dalam penetapan tarif Pajak Progresif perlu disesuaikan dengan memperhatikan Nilai Jual Kendaraan serta bobot yang mencerminkan secara relatif faktor kerusakan jalan dan lingkungan yang diakibatkan oleh pengguna.⁶

⁵KlikPajak.com Portal Perpajakan Indonesia.

⁶Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1999 *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.*

Beranjak dari permasalahan penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak Progresif, dengan mengambil fokus permasalahan tentang bagaimana analisis kontribusi penerimaan pajak Progresif. Maka penelitian tersebut selanjutnya di tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Kontribusi Penerimaan Pajak Progresif Terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan penelitian ini, penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, untuk membantu membuat sesuatu yang sukses.
2. Penerimaan adalah produksi yang dilakukan oleh seorang produsen akan menghasilkan sejumlah barang, atau produk. Produk inilah yang merupakan jumlah barang yang akan dijual dan hasilnya merupakan jumlah penerimaan bagi seorang produsen. Jadi pengertian penerimaan adalah sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atas penjualan produk yang dihasilkan. Dalam ilmu ekonomi penerimaan diistilahkan revenue.
3. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.⁷

⁷Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, edisi 3,2007)

4. Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa (fees), bunga, dividen, royalti, dan sewa. Pendapatan merupakan hal yang sangat penting, karena pendapatan itu yang menjadi objek atas kegiatan perusahaan. Pengertian pendapatan bermacam-macam, tergantung dari segi mana kita melihat pengertiannya.

E. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis, merupakan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Potensi Pajak Progresif Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang berhubungan dengan Pajak Progresif.
 - c. Bagi masyarakat luas, diharapkan menjadi informasi dan tambahan bacaan untuk memperluas pengetahuan mereka.
2. Manfaat Teoritis

Sebagai informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat luas mengenai permasalahan tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kegunaan, sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengamat dan akademis serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang Analisis kontribusi penerimaan pajak Progresif terhadap pendapatan pada dinas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Acuan bagi kalangan civitas akademis, khususnya bagi yang berkepentingan terhadap hasil yang telah diteliti ini dan bagi siapa saja yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
3. Sebagai khazanah perbendaharaan bagi perpustakaan Kampus IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Khususnya.

G. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis terhadap karya-karya tulis sebelumnya, penulis belum menemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang Analisis kontribusi penerimaan pajak progresif terhadap pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian penulis, antara lain adalah penelitian dilakukan oleh Mawardi (C0D108207) mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat dengan judul *Analisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin*⁸.

Terus Penelitian yang dilakukan oleh Novia Lestari C0D108216 Fakultas Ekonomi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat dengan judul *Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Teluk Tiram Kota Banjarmasin*.

Dan ada juga penelitian yang dilakukan saudara Rosida mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat berjudul *Sistem Pengendalian Inter Penerimaan Pajak Pada Pesona Borneo*.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah kontribusi penerimaan pajak restoran yang mengais pendapatan dari restoran, namun perbedaannya lebih terlihat jelas dominan. Dari segi fokus penelitian, penelitian diatas memfokuskan pada sebab terjadinya peningkatan pendapatan

⁸Secretariat Diploma III Perpajakan, 2008, *Pedoman Laporan Tugas Akhir* Program Diploma III, Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin.

restoran di Kota Banjarmasin. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor Kota Banjarmasin, serta penulis lebih fokus pada kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini Disusun dalam lima Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, Bab ini berisi beberapa sub bab yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, signifikansi penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, Di dalam bab ini dibahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, jenis pajak, keuangan daerah, pengertian pajak daerah, pembagian dan jenis pajak daerah, pengertian pajak progresif, objek pajak Progresif, bukan objek pajak progresif, subjek pajak progresif, dasar pengenaan pajak progresif, dan tarif pajak progresif.

Bab III Metode Penelitian, Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil Penelitian, Laporan hasil penelitian yang berisi Penyajian data, Laporan Penelitian.

Bab V Penutup, Penutup yang berisikan Kesimpulan, Saran-saran, Daftar pustaka.